

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN
DI DESA CORAWALI KECEMATAN TANETE RILAU
KABUPATEN BARRU**

SKRIPSI



ST.AISYAH
105711106619

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA CORAWALI
KECAMATAN TANETE RILAU KAB BARRU**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

ST.AISYAH
1057111106619

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar***

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Tidak ada sesuatu yang indah di dapatkan dengan cara yang mudah. Dan hanya kepada tuhanmu lah engkau berharap. “

PERSEMABAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku ayah Abd.Salam Dolo(AI-marhum) Dan ibu Yangkana Cannani Serta kakak-kaka ku yang telah memberikan saya dukungan dan doanya sehingga saya dapat menyelesaikan studi. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada dosen pembimbing saya yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

PESAN DAN KESAN

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan maka dari itu penulis memohon maaf jika pembaca menemukan kesalahan dan kekurangan dalam isi skripsi saya.

Sangat berkesan dapat menempu studi S1 Di Universitas Muhammadiyah Makassar



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : St.Aisyah

No. Stambuk/NIM : 105711106619

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panita penguji skripsi strata sat (S1) pada tanggal 29 juli 2023 di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Juli 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Ikram Idrus. M.Si
NIDN. 0026125901

Pembimbing II

Warda SE..M.E
NIDN. 0931108803

Mengetahui:



Dekan
Dr.H.Andi Jam'an. S.E..M.Si
NBM : 651 507

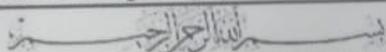
Ketua program Studi

Asdar. SE..M/Si
NBM: 128 6845



PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : St. Aisyah Nim: 105711106619 diterima dan disahkan oleh panitia penguji Ujian Skripsi Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 009/SK-Y/60201/091004/2023 M Tanggal 11 Muharram 1445 H/29 Juli 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 11 Muharram 1445 H

29 Juli 2023

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag
(Rektor Unimsuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M. Si
(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
3. Sekertaris : Agusdiwana Suarni, SE., M. Acc
4. Penguji : 1. Dr. Muhammad Ikram Idrus, M. Si
2. Naidah, SE., M. Si
3. Ismail Rasulong, SE., M. M
4. Warda, SE., M. E

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M. Si
NBM : 651507



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : St. Aisyah
Stambuk : 105711106619
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Nelayan Di Desa Corawali Kecamatan Tanete
Rilau Kabupaten Barru

Dengan ini menyatakan

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 11 Muharram 1445 H

29 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan

St. Aisyah

105711106619

Diketahui Oleh :

Dekan



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si

NBM : 651 507

Ketua program Studi

Asdar, SE., M.Si

NBM: 128 6845

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : St.Aisyah
NIM : 105711106619
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan mengalih media/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Makassar, 11 Muharram 1445

29 Juli 2023 M

Yang Membuat Pernyataan



St. Aisyah
10571110661

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Corawali Kecamatan Tanate Rilau Kabupaten Barru.”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Abd salam Dolo (Al-Marhum) dan Ibu. Yangkana Cannani yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Asdar S.E., M.Si., sebagai ketua prodi S1 Ekonomi Pembangunan.
4. Bapak Ikram Idrus M.Si sebagai pembimbing 1
5. Ibu Warda S.E.,M.E sebagai pembimbing 2
6. Bapak/Ibu Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Angkatan 2019 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terimakasih untuk semua, sahabat, teman yang senantiasa membantu dan kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar. Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 20 Juli 2023

Penulis

Abstrak

St.Aisyah. 2023.Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.Skripsi.

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh : Ikram Idrus,M.Si dan WardaSE.,M.E

Tujuan penelitian yang ini yaitu untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di desa corawali kecamatan tanete rilau kabupaten barru. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang bersifat analisis deskriptif kualitatif. Analisisnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam. Jenis penelitian ini juga berupa metode penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa berupa individu atau kelompok.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian masyarakat di desa corawali sumber pendapatannya berasal dari petani, pedagang, pns dan lainnya. Akan tetapi sebagian masyarakat yang tinggal di desa corawali khususnya di dusun aluppangnge pendapatannya berasal dari nelayan.Peran pemerintah desa yang bekerja sama dengan dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Barru telah membantu kehidupan masyarakat nelayan di desa corawali melalui bantuan dan pemberdayaan nelayan walaupun belum begitu maksimal.

Kata kunci : Peran Pemerintah Desa, Kesejahteraan nelayan

Abstract

St. Aisyah. 2023. The Role of the Village Government in Efforts to Improve the Welfare of the Fisherman Community in Corawali Village, Kecamatan Tanete Rilau, Barru Regency. Thesis.

Department of Development Economics, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised By: Ikram Idrus, M.Si and Warda SE., M.E

The research objective to be achieved is to find out the role of the village government in an effort to improve the welfare of the fishing community in Corawali village, Tanete Rilau sub-district, Barru district. This type of research is a type of qualitative research, this research was conducted using a method that is qualitative descriptive analysis. The analysis leads to a detailed and in-depth description. This type of research is also a research method that is focused on a particular case to be observed and analyzed carefully to completion. The case in question can be an individual or a group.

The results of this study indicate that the economic conditions of the people in Corawali Village are sources of income from farmers, traders, civil servants and others. However, some of the people who live in Corawali Village, especially in Aluppangnge Hamlet, derive their income from fishermen. The role of the village government in collaboration with the Fisheries and Maritime Service of Barru Regency has helped the lives of the fishing community in Corawali Village through assistance and empowerment of fishermen, although not so optimal.

Keywords: Role, Welfare, fishermen

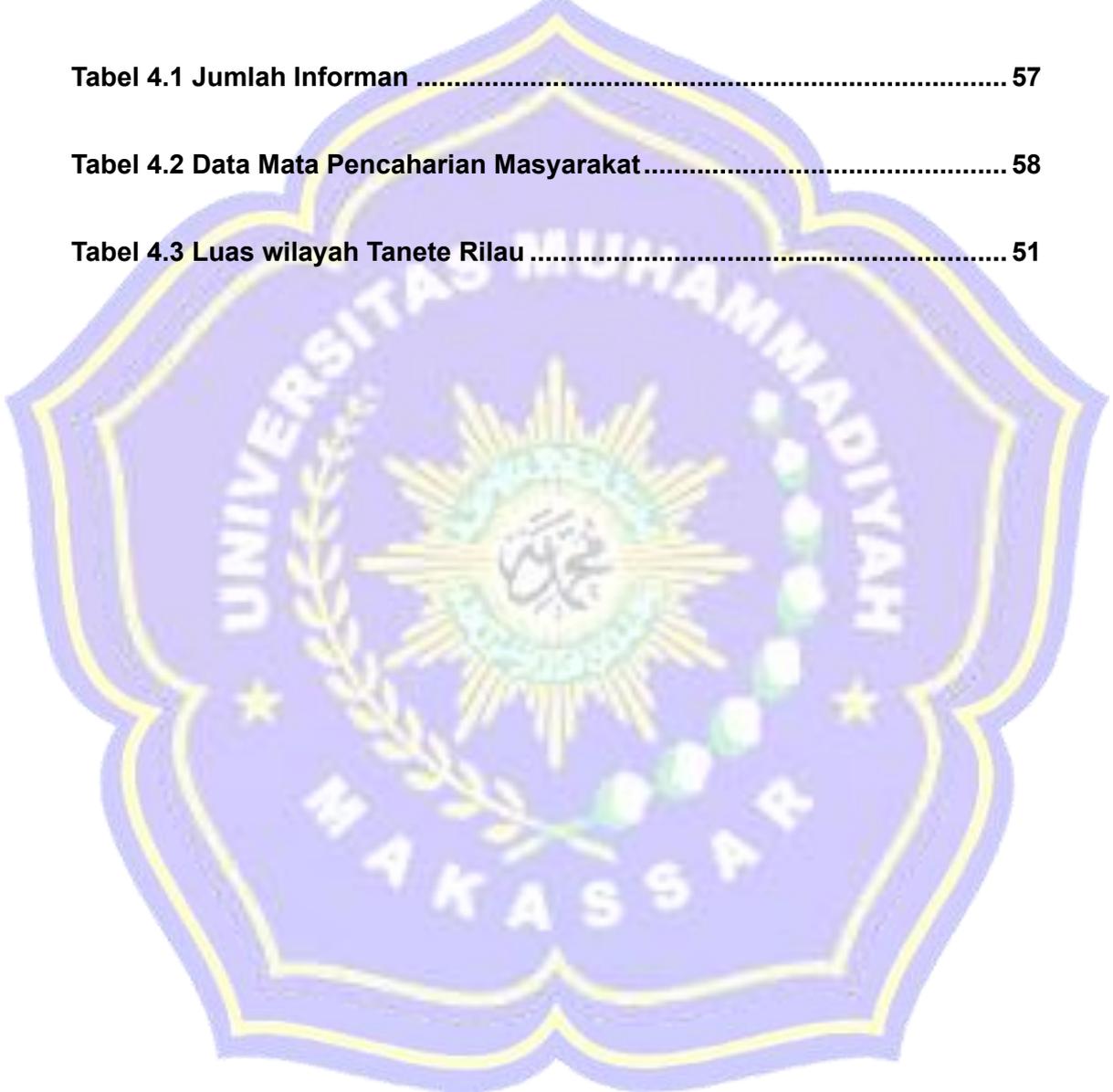
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
Abstrak.....	x
Abstract.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Teori.....	6
1. Pemerintah.....	6
2. Teori Kesejahteraan.....	13
3. Pemberdayaan Masyarakat.....	19
4. Masyarakat Nelayan	20
5. Pendapatan Nelayan.....	23
B. Tinjauan Empiris	26
C. Kerangka Pikir.....	38

BAB III	41
METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Fokus Penelitian.....	41
C. Situs dan Waktu Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Informan Penelitian.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44
G. Metode Analisis Data	45
BAB IV	48
HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	48
1. Gambaran umum Kabupaten Barru	48
2. Aspek Kependudukan	49
3. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Tanete Rilau.....	50
B. Hasil Penelitian	57
1. Karakteristik Responden	57
2. Kondisi Prekonomian Masyarakat Nelayan Di Desa Corawali Kabupaten Barru 58	
3. Faktor-faktor pemberdayaan masyarakat nelayan.	64
4. Peran Pemerintah Desa	68
C. PEMBAHASAN	73
BAB V	76
PENUTUP	76
1. KESIMPULAN	76
2. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
BIOGRAFI PENULIS.....	988

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian	43
Tabel 4.1 Jumlah Informan	57
Tabel 4.2 Data Mata Pencaharian Masyarakat.....	58
Tabel 4.3 Luas wilayah Tanete Rilau	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 40
Gambar 4.1 Struktur organisasi Desa Corawali..... 56



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah dan harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dibentuk guna mengatur mengenai Kelautan yang bertujuan menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim. Mendayagunakan Sumber Daya Kelautan Dan/atau kegiatan di wilayah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara. Mewujudkan laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara.

Mewujudkan Laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia, memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Mewujudkan budaya dan pengetahuan Kelautan bagi masyarakat: mengembangkan sumber daya manusia di bidang Kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan Kelautan secara optimal dan terpadu. Memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan. Dan mengembangkan peran

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam peraturan Kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 1 ayat 5 bahwa "Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 *gross ton* (GT)". Penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan Indonesia umumnya masih bersifat tradisional terutama penggunaan alat tangkap dan teknik penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan. Dalam pengembangan teknologi, ini akan menjadi PR untuk pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan teknologi.

Hal ini dianggap penting karena dengan adanya pemahaman yang baik terhadap masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai nelayan, diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian dan keleluasaan pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Karena masih banyak masyarakat nelayan yang belum mampu meningkatkan kesejahtraanya.

Tingkat kesejahteraan yang rendah saat ini masih menjadi persoalan kehidupan masyarakat nelayan. Selama beberapa dekade pembangunan, gambaran nelayan umumnya masih saja berada di bawah garis kesejahteraan dengan pendapatan yang tidak menentu, hidup jauh dari berkecukupan, sementara usaha perikanan sendiri atau usaha lain yang terikat dengan sektor kelautan tak banyak berjalan baik, kenyataan ini tentu saja sangat ironis, ketika

mengingat tingkat kesejahteraan yang kurang terjadi ditengah berlimpahnya produk kenelayan kita.

Tingkat kesejahteraan yang melanda kehidupan nelayan disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim-musim ikan keterbatasan sumber daya manusia, modal serta akses, jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen, tetapi juga disebabkan oleh dampak negatif modernisasi perikanan yang mendorong terjadinya pengurasan sumber daya laut secara berlebihan. Proses demikian masih terus berlangsung dan dampak lebih lanjut sangat terasakan oleh nelayan adalah semakin menurunnya tingkat pendidikan mereka dan sulitnya memperoleh hasil tangkapan. Hasil studi-studi tentang tingkat kesejahteraan hidup dikalangan masyarakat nelayan telah menunjukkan bahwa kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi atau ketimpangan pendapatan merupakan persoalan krusial yang dihadapi dan tidak mudah untuk diatasi (Kusnadi, 2002:7).

Dalam hal ini peran pemerintah juga sangat penting dalam pendampingan, pengembangan serta pengelolaan baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Diharapkan dengan peran pemerintah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dalam meningkatkan produksi atau hasil tangkap. Namun sampai saat ini masih ada beberapa kendala yang dihadapi para nelayan dalam meningkatkan produksi atau hasil tangkapannya, salah satunya dalam penggunaan alat tangkap yang digunakan masih menggunakan alat tangkap tradisional (seperti pukat hela dan jala). Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan-permasalahan yang

dialami oleh masyarakat nelayan sangat memprihatinkan maka dari itu pemerintah harus mengupayakan beberapa hal agar permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan memiliki solusi untuk tetap mempertahankan mata pencaharian mereka dengan harapan bantuan dan kerjasama dari pihak pemerintah khususnya pemerintah desa dalam membantu peningkatan kesejahteraan nelayan. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang “ Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini terpusat pada suatu pokok permasalahan yang berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang keilmuan serta wawasan mengenai peran penting pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Corawali

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Menambah pengalaman dalam ilmu ekonomi pada peran pemerintah desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan serta menambah pengetahuan dan informasi bagi penulis.

b. Bagi Pemerintah Desa Corawali

Penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi pemerintah desa corawali pada masyarakat luas, dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Corawali.

c. Bagi Institut

Sebagai tambahan pustaka yang dapat di manfaatkan oleh dosen, mahasiswa, maupun staf akademik sehingga membantu pengetahuan dalam ilmu ekonomi pembangunan.

d. Bagi Pembaca

Diharapkan semoga penulisan ini dapat bermanfaat sebagai tambahan wacana serta tambahan informasi dan menambah wawasan bagi pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pemerintah

Secara etimologi, pemerintah dapat diartikan melakukan pekerjaan menyuruh yang berarti memiliki empat unsur yaitu terdiri dari dua pihak, unsur yang diperintah yaitu rakyat dan unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan diantara keduanya ada hubungan.⁴ Pemerintah dalam arti luas dapat diartikan sebagai pemerintah di bidang legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit dapat diartikan sebagai pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara.

Pemerintah merupakan pemangku jabatan (pejabat = *ambtsdrager*) pemerintahan (untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan-jabatan). Penggunaan kata *government* (pemerintah) dalam bahasa Inggris juga sering menimbulkan kesalahpahaman. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kata tersebut mengandung dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit.

Pemerintah dalam arti luas adalah pemerintah di bidang legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Pemerintah dalam arti sempit adalah pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah sebagai penyelenggara administrasi Negara.

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa pengertian yang berbeda. Pada pengertian lebih luas, dapat merujuk secara kolektif pada tiga cabang kekuasaan pemerintah yakni cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Selain itu juga diartikan sebagai eksekutif dan legislatif secara bersama-sama, karena kedua cabang kekuasaan inilah yang bertanggung jawab atas tata kelola bangsa dan pembuatan undang-undang. Sedangkan pada pengertian lebih sempit, digunakan hanya merujuk pada cabang eksekutif berupa Kabinet Pemerintahan karena ini adalah bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan sehari-hari.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian pemerintah pusat adalah penguasa yang bertugas di pusat, melingkungi seluruh pemerintah daerah. Pemerintahan pusat adalah seluruh penyelenggaraan pemerintahan yang tidak diselenggarakan daerah otonom.⁸ Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan berlakunya dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah sebab seperti diketahui bahwa

dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sudah bergantiganti sesuai dengan perkembangan dan perjalanan pemerintahan itu sendiri sejak kemerdekaan. Pengertian Pemerintah Daerah menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi. Sedangkan pengertian Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Desentralisasi menurut Hoogerwarf merupakan pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan publik yang lebih tinggi kepada badan-badan publik yang lebih rendah kedudukannya untuk secara mandiri dan berdasarkan kepentingan sendiri mengambil keputusan di bidang pengaturan (regelendaad) dan di bidang pemerintahan (bestuursdaad). dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah yang merupakan bagian dari pemerintahan pusat.¹¹ Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara. Sebutan ini digunakan untuk melengkapi lembaga-lembaga tingkat negara-bangsa, yang disebut sebagai pemerintah pusat, pemerintah nasional, atau (bila perlu) pemerintah federal. "Pemerintah Daerah" hanya beroperasi menggunakan kekuasaan yang diberikan undang-undang atau arahan tingkat pemerintah yang lebih tinggi dan masing-masing negara memiliki sejenis pemerintah daerah yang berbeda dari satu negara ke negara lain.

Dalam masyarakat primitif, tingkat pemerintah daerah terendah adalah kepala desa atau kepala suku. Negara federal seperti Amerika Serikat memiliki dua tingkat pemerintah di atas tingkat daerah. Pemerintah lima puluh negara bagian dan pemerintah nasional federal yang hubungannya dijembatani oleh konstitusi Amerika Serikat. Pemerintah daerah di Amerika Serikat sudah ada sejak masa kolonial dan terus berubah-ubah sejak itu. Tingkat tertinggi pemerintah daerah adalah tingkat *county*.

Mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Pasal 18 UUD 1945 telah mengatur pembagian wilayah negara kesatuan RI menjadi daerah provinsi yang kemudian dibagi lagi menjadi daerah

kabupaten/kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut merupakan Amandemen Kedua yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Sebelum amandemen, ketentuan Pasal 18 UUD 1945 berbunyi : “ Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil , dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undangundang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Menurut Iyas Yusuf (2014:05) fungsi pemerintah dalam kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

a. Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala menurutkegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika

pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan , pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Pasal 18 UUD 1945 tentang pemerintah daerah telah menjelaskan kedudukan pemerintah dalam pembangunan dan pemerintahan negara. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah bersifat seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan wewenangnya dalam mengurus rumah tangga daerah.

Pembangunan negara dilakukan berkesinambungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maka, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah haruslah ada komunikasi dan hubungan dalam menjalankan urusan pemerintahnya. Komunikasi dilakukan untuk

menghindari penyalahgunaan wewenang. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam UUD 1945 BAB VI 18A. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan memerhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang diatur secara adil dan selaras. Negara juga mengakui dan menghormati pemerintahan daerah dan satuannya yang bersifat istimewa atau khusus. Negara mengakui pemerintahan daerah yang bersifat adat dan tradisional seperti kesultanan dan kerajaan adat yang memiliki pemerintahan sendiri.

Bagian pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha serta penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang didekonsentrasikan dan ditugas pembentukan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota serta pemerintahan desa, penegasan perbatasan provinsi dan antar kabupaten/kota. Adapun fungsi dari pemerintahan antara lain:

1. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan umum dibidang pemerintahan
2. Penyelenggaraan fasilitasi pemerintahan

3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bagian pemerintahan
4. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Teori Kesejahteraan

Grand theory Kesejahteraan yaitu Welfare State menurut Bentham (1748-1832), mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau welfare) *of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah „utility’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk.

Kesejahteraan menurut united nations development program (UNDP): Kesejahteraan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperluas pilihan- pilihan dalam hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian “adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik”.

Kesejahteraan menurut BAPPENAS: Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki- laki dan perempuan mampu memenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kesejahteraan menurut UUD 1945: Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kesejahteraan menurut *world bank*: Kesejahteraan yang didefinisikan adalah kehilangan rasa kemiskinan. Dengan menggunakan ukuran batas kemiskinan PPP (*Purchasing Power Parity*) US \$ perkapita perhari, yaitu nilai tukar yang menunjukkan daya beli mata uang di suatu negara, untuk membeli barang dan jasa yang sama di negara lain. Contoh sederhananya adalah apabila di Indonesia seseorang membeli beras seharga Rp. 9.000 per liter, sementara di Amerika Serikat satu liter beras dengan kualitas yang sama harganya 1 (satu) US\$, dengan nilai tukar biasa artinya Rp. 14.000, tetapi dengan pengertian nilai tukar PPP, maka orang di Indonesia yang membeli beras dianggap telah membelanjakan 1 US\$, walaupun pada hakikatnya hanya mengeluarkan uang Rp. 9.000.

Kesejahteraan Negara Kesejahteraan Kesejahteraan menjadi tujuan utama kehidupan tiap individu dengan ukuran-ukuran yang berbeda sesuai dengan pandangan, agama, dan doktrin mereka masing-masing. Dalam dunia Internasional, indikator tersebut sering merujuk kepada pendapatan perkapita, panjangnya masa hidup dan tingkat pendidikan yang diraih.

Konsep kesejahteraan sosial setidaknya dapat dibatasi menjadi sebuah bidang kajian akademik dan sebagai sebuah institusi sosial dalam sistem kenegaraan. NASW (*National Association of Social Workers*)

sebuah organisasi pekerjaan sosial di Amerika, mendefinisikan social welfare sebagai sistem suatu negara yang berkenaan dengan program, keuntungan, dan pelayanan yang membantu masyarakat untuk menemukan kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang menjadi dasar bagi kelangsungan hidup mereka.⁷ Pada akhirnya, Perbincangan mengenai kesejahteraan sosial akan mengerucut pada dua poin utama, yaitu (1) apa yang didapatkan individu dari masyarakatnya, dan (2) seberapa jauh kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi.

Hingga saat ini, dikenal tiga bentuk model penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu residual welfare state yang memberikan pemerintah lebih sedikit kesempatan dalam intervensi publik sehingga sangat membuka pintu untuk swastanisasi, model institusional/universalist welfare state yang menekankan negara untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal dan komprehensif, dan *social insurance welfare* yang berupaya menempatkan *social welfare* (campur tangan negara dalam urusan kesejahteraan sosial) sebagai alat untuk meningkatkan produktifitas kelompok masyarakat penerima layanan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang. Implementasi konsep ini dengan integrasi fungsi pemerintah - dunia usaha – buruh.

Paradigma kesejahteraan ekonomi rakyat memang sangat perlu diupayakan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Upaya-upaya ke arah tingkat kesejahteraan ekonomi tersebut selama ini dianggap cukup memadai melalui peningkatan kemakmuran rakyat (pembangunan ekonomi) atau melalui program-

program penanggulangan kemiskinan yang hasilnya memang sejauh ini masih belum menggembirakan.

Terbukti bahwa berbagai upaya dan beberapa program-program pemerintah yang banyak tidak berhasil, terutama karena dilaksanakan dalam kerangka sistem ekonomi pasar bebas yang kapitalistik liberal, yang tidak peduli pada "nasib" rakyat kecil dan membiarkan terjadinya persaingan liberal antara konglomerat dan ekonomi rakyat. Inilah masalah besar sistem perekonomian yang kini berjalan di Indonesia. Sehubungan dengan usaha penciptaan kesejahteraan ekonomi rakyat tersebut, agenda pemerintah yang telah ditetapkan tersebut merupakan agenda untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Rakyat, dimana agenda ini diarahkan pada pencapaian lima sasaran pokok, yaitu:

1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Berkurangnya kesenjangan antar wilayah;
3. Meningkatkan kualitas manusia,
4. Membaiknya mutu lingkungan hidup, dan
5. Meningkatnya dukungan infrastruktur.

Sedangkan terdapat juga agenda kinerja pemerintah dalam bidang kesejahteraan ekonomi rakyat yang diuraikan dalam delapan bidang, yaitu:

1. Penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial
2. Ekonomi
3. Pembangunan daerah
4. Sumber daya manusia
5. Agama

6. Sumber daya alam dan lingkungan hidup
7. Infrastruktur dan
8. Penanggulangan pasca bencana alam

Dilihat dari segi realitas saat ini, agenda tersebut sebagian besar tidak dapat dijalankan dengan benar, justru semakin membuat masyarakat kecil mengalami kesenjangan hidup yang semakin meningkat dalam hal perekonomian yang semakin sulit, ditambah lagi dengan berbagai macam persoalan perekonomian negara, mulai dari permasalahan kenaikan harga BBM, krisis energi, krisis pangan yang mengakibatkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok, dan lain sebagainya.

Kesejahteraan ekonomi sangat sulit dicapai bila keadaan perekonomian tidak semakin membaik, dan masalah ekonomi dianggap wilayah kecil yang merupakan bagian dari wilayah besar masyarakat. Dengan perkembangan masyarakat yang makin kompleks, kehidupan ekonomi menjadi makin penting dan lama-kelamaan dalam sistem (ekonomi) kapitalisme seakan-akan menjadi jauh lebih penting daripada masyarakat sendiri. Masyarakat Indonesia telah menyadari bahwa krisis yang dihadapi sejak 1997 merupakan krisis multidimensi (politik, ekonomi, budaya), namun orang cenderung dengan mudah menyebutnya sebagai krisis ekonomi.

Pengangguran dan kemiskinan berhubungan erat dengan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi, yang ditentukan oleh pertumbuhan investasi dan ekspor, bila pertumbuhan tersebut ingin berkelanjutan (sustainable). Mengubah pola pertumbuhan ekonomi yang

sampai sekarang hampir mencapai 80% ditambah lagi dengan kenaikan harga BBM yang mempengaruhi perekonomian secara menyeluruh, menunjukkan bahwa kinerja pemerintah tidaklah mudah dan segala macam kendala yang muncul harus selalu diatasi salah satunya seperti kegiatan pemberantasan korupsi yang harus selalu dijalankan.

Mengenai ketimpangan ekonomi di Indonesia dapat dicontohkan pada persoalan pangan yang terus menghantui Indonesia. Mengenai kesejahteraan ekonomi rakyat, tentulah akan sangat jauh diharapkan bila tidak ada kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Akan tetapi terdapat permasalahan yang sangat serius bila dalam hal krisis pangan pemerintah masih perlu untuk melakukan impor, karena kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit.

Berikut terdapat penjelasan mengapa di Indonesia masih dinilai belum bisa menciptakan negara dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang baik:

1. figur kemiskinan yang tidak banyak mengalami perbaikan, dan peran negara yang nyaris tidak disarakan oleh masyarakat.
2. Munculnya bentuk dan dinamika perdagangan industry yang amat cepat, canggih, dan sulit untuk diikuti.
3. Lalu lintas manusia: dalam komunikasi, dalam transportasi dan perpindahan tempat, jumlah dan sebagainya.

Melalui serangkaian kebijakan dari pemerintahan yang satu ke pemerintahan berikutnya, negara memanglah harus semakin memantapkan eksistensi dan keberlanjutan negara; semakin mengamankan negara dari berbagai ancaman pada masa kini maupun

pada masa depan; dan memajukan perikehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang, termasuk kesejahteraan ekonomi rakyat dan peradabannya.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002). Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri.

Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Adapun bentuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, pemodalan/permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

4 . Masyarakat Nelayan

Secara geografis, masyarakat Nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Menurut Imron dalam Mulyadi (2005) , Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan-LIPI telah menghitung waktu rata-rata nelayan melaut dalam setahun sebanyak 200 hari, yaitu seluruh hari memungkinnya dapat melaut, pada saat melaut, nelayan memanfaatkan waktu secara optimal untuk bekerja. Sebaliknya, nelayan biasanya tidak melaut saat terang bulan atau cuaca benar-benar sangat buruk.

Karena masyarakat nelayan merupakan unsur sosial yang sangat penting dalam struktur masyarakat pesisir, maka kebudayaan yang mereka miliki mewarnai karakteristik kebudayaan atau perilaku sosial budaya masyarakat pesisir secara umum, karakteristik yang menjadi ciri-ciri sosial budaya masyarakat nelayan diantaranya memiliki relasi patron-klein sangat kuat. Etos kerja tinggi, memanfaatkan kemampuan diri dan adaptasi optimal, kompetitif dan berorientasi prestasi, apresiatif terhadap keahlian, kekayaan, dan kesuksesan hidup, terbuka dan ekspresif, solidaritas sosial tinggi, sistem pembagian kerja berbasis seks (laut menjadi ranah laki-laki dan darat adalah ranah kaum perempuan), dan berperilaku "konsumtif". Karakteristik masyarakat, dalam hal ini masyarakat mana saja (tanpa kecuali), dikatakan Dahrendorf bahwa ; setiap masyarakat kapan saja tunduk pada proses perubahan sosial itu ada di mana-mana, setiap masyarakat kapan saja memperlihatkan perpecahan dan konflik yang mana konflik itu juga ada di mana-mana, dan setiap elemen dalam suatu masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan yang mana setiap masyarakat juga didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain.

Nelayan atau kelompok nelayan sesuai UU No 9 tahun 1985 adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan yang mencakup, menangkap, membudidayakan, mendinginkan atau mengawetkan ikan dengan tujuan komersial.

Klasifikasi nelayan berdasarkan kelompok kerja yaitu (Mukhtar :2014)

;

1. Nelayan Perorangan

Nelayan perorangan merupakan nelayan yang memiliki peralatan tangkap ikan sendiri, dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

2. Nelayan Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Nelayan KUB merupakan gabungan dari minimal 10 orang nelayan yang kegiatan usahanya terorganisir dan tergabung dalam kelompok usaha bersama non-badan hukum.

3. Nelayan Perusahaan

Nelayan perusahaan merupakan nelayan pekerja atau pelaut perikanan yang terikat dengan perjanjian kerja kelautan dengan badan usaha perikanan.

Pada daerah penelitian, sebagian besar merupakan nelayan kecil perikanan skala kecil dapat diklasifikasikan ke dalam kondisi/karakter usaha dimana nelayan sebagai operator usahanya. Dengan kata lain operator usaha perikanan tangkap skala kecil diklasifikasikan sebagai nelayan kecil (Smith, 1983) dalam Sembiring (2015) diantaranya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Kegiatan dilakukan dengan unit penangkapan skala kecil, kadang-kadang menggunakan perahu bermesin atau tidak sama sekali.
2. Aktivitas penangkapan merupakan paruh waktu, dan pendapatan keluarga adakalanya ditambah dari pendapatan lain dari kegiatan di luar penangkapan.
3. Kapal dan alat tangkap biasanya dioperasikan sendiri
4. Alat tangkap dibuat sendiri dan dioperasikan tanpa bantuan mesin

5. Investasi rendah dengan modal pinjaman dari penampung hasil tangkapan
6. Hasil tangkapan per unit usaha dan produktivitas pada level sedang sampai sangat rendah
7. Hasil tangkapan tidak dijual kepada pasar besar yang terorganisir dengan baik tapi diedarkan di tempat-tempat pendaratan atau dijual dilaut.
8. Sebagian atau keseluruhan hasil tangkap dikonsumsi sendiri bersama keluarga
9. Komunitas nelayan kecil seringkali terisolasi baik secara geografis maupun sosial dengan standar hidup keluarga nelayan yang rendah sampai batas minimal.

5. Pendapatan Nelayan

Sumber daya perikanan sebenarnya secara potensial dapat di manfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, namun pada kenyataannya masih cukup banyak nelayan yang belum dapat meningkatkan hasil tangkapannya, Sehingga dalam hal ini tingkat pendapatan nelayan tidak meningkat oleh karna itu tingkat kesejahteraan nelayan sangat di tentukan oleh hasil tangkapannya. Banyaknya tangkapan tercermin pula besar pendapatan yang diterima dan pendapatan tersebut sebagian besar untuk keperluan konsumsi keluarga. Dengan demikian tingkat pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga atau kebutuhan fisik minimum sangat di tentukan oleh pendapatan yang di terima. Para usaha nelayan melakukan pekerjaan dengan tujuan untuk

memperoleh pendapatan demi kebutuhan hidup. Untuk pelaksanaannya di perlukan beberapa perlengkapan dan di pengaruhi oleh banyak faktor guna mendukung keberhasilan kegiatan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan ialah:

1. Modal dapat diartikan secara fisik dan bukan fisik. Dalam arti fisik modal diartikan sebagai segala hal yang melekat pada factor produksi, seperti mesin-mesin dan peralatan-peralatan produksi. Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh para nelayan dalam melakukannya. Modal pada perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan. Modal asing diartikan dalam hal ini adalah baik jangka panjang maupun jangka pendek. Modal kerja adalah merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan (S.Munawir, 2010:19).
2. Teknologi Nelayan dikategorikan sebagai seseorang yang pekerjaannya menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang sederhana, mulai dari pancing, jala, jaring, pukat, dan lain sebagainya. Namun dalam perkembangannya dikategorikan sebagai seorang yang berprofesi menangkap ikan dengan alat yang lebih modern ialah kapal ikan dengan alat tangkap modern. Semakin canggih teknologi yang digunakan nelayan maka akan semakin meningkatkan produktifitas hasilnya lebih meningkatkan produksi, yang didalamnya tersirat kesimpulan bahwa masyarakat akan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi.

3. Pengalaman Kerja Pengalaman kerja atau lamanya menjadi seorang nelayan adalah faktor yang juga dianggap penting dalam penelitian ini. Dikarenakan semakin lama seorang nelayan mencari mata pencahariannya dilaut maka tingkat pengalamannya juga akan semakin besar. Dengan hal ini, kecenderungan pendapatan nelayan juga dianggap meningkat (Dhian, 2012:11). Pengalaman sangat di butuhkan setiap pekerjaan. Pengalaman di butuhkan untuk produksi nelayan. Mencari ikan di butuhkan waktu, peralatan, lokasi ikan. Dan umpan ikan yang tepat. Hal tersebut dapat di ketahui oleh nelayan berdasarkan berjalannya waktu. Semakin pahan seorang nelayan dengan kondisi laut dan karakteristik ikan dapat mempermudah nelayan tersebut menangkap ikan, Menggunakan alat yang masih sederhana memaksa nelayan menggunakan pengalaman untuk menangkap ika, Semakin lama pengalaman maka semakin peka nelayan terhadap posisi ikan sehingga memudahkan nelayan untuk menangkap ikan di laut. Pengalaman sebagai nelayan secara langsung maupun tidak langsung, memberikan pengaruh kepada hasil penangkapan ikan. Semakin lama seseorang mempunyai pengalaman sebagai seorang nelayan maka, semakin besar pula hasil dari penangkapan ikan dan pendapatan yang diperoleh.
4. Jarak Tempuh Melaut Faktor jarak tempuh yang dilalui nelayan ketika melaut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan karena apabila jarak tempuh yang semakin jauh maka kemungkinan untuk mendapatkan hasil (produksi) akan semakin meningkat atau akan lebih banyak sehingga memberikan pendapatan

yang lebih besar dibandingkan penangkapan yang dilakukan didekat pantai. Jarak tempuh yang jauh membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke lokasi penangkapan ikan, sehingga bisa mendapatkan hasil tangkapan yang banyak dan menyebabkan tingkat pendapatan nelayan juga meningkat. Sehingga dapat dikatakan bahwa jarak tempuh yang jauh akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan nelayan. (Dahuri, 2004 : 67).

B. Tinjauan Empiris

Adapun Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO.	Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Abdul Aziz/ 2022	Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kota Tarakan (Studi Kasus Kelurahan Selumit Pantai)	Analisis interaktif	1.Menambah Jumlah Tangkap. 2.Meningkatkan Jumlah Produksi/Hasil Tangkap Nelayan, Untuk Mendapatkan Penghasilan Yang Lebih Banyak. 3.Mengelola Hasil Tangkap Menjadi Nilai Jula Yang Tinggi Untuk Meningkatkan

				<p>Pendapatan Agar Mendapatkan Kesejahteraan Yang Lebih Tinggi, Sehingga Nelayan Perlu Menambah Wawasan Atau Melakukan Pengelolaan Terhadap Hasil Tangkapnya Untuk Mendapatkan Nilai Jual Yang Tinggi.</p>
				<p>4. Menjalin Hubungan Kerjasama Yang Baik Dengan Para Pengumpul Pesatnya Perkembangan Komunikasi Dan Transportasi Di Era Saat Ini, Memudahkan Para Pengusaha Dan Pengumpul Untuk Saling Berkomunikasi Dan Berinteraksi Jual Beli Hasil Tangkapan. Sehingga Pengumpul Terjalin hubungan</p>

				Kerjasama Yang Baik Diantara Keduanya.
2.	Julia Damima, Fanley N,Pangemanan Welly Wawarunden/2022	Fungsi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Suatu Kasus: Di Desa Boyongpante Kecamatan Sinosyang Kabupaten Minahasa selatan)		1.Peran Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Nelayan Di Desa Boyongpante Kecamatan Sonosyang Kabupaten Minahasa Selatan, Telah Menjelaskan Peran Tersebut Dapat Dibuat Pemerintah Untuk Masyarakat Nelayan Seperti Penyuluhan Dan Pendampingan Serta Kelembangan Nelayan. 2.Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Didesa Boyong Pante Kecamatan Sinosyang Kabupaten Minahasa

				Selatan Dapat Dilihat Dari Dengan Adanya Bantuan Seperti Menyediakan Sarana Dan Prasarana Serta Memberikan Modal Usaha Kepada Nelayan Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Nelayan.
3.	Kelvin Oktovianus Karanda, Fanley N, Pangemanan Neni Kumayas/ 2022	Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dlam Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Inobonto Dua Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mangondow		Peran Desa Inobonto Dua Telah Melakukan Upaya Dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan Dengan Cara Membentuk Kelompok Nelayan Dengan Tujuan Sebagai Wadah Untuk Berkumpul Dalam Menggurangi Masalah Dan Memberikan Bantuan Peralatan Dalam Melaut Seperti Mesin Ketinting. Akan Tetapi, Kurangnya Keaktifan Kelompok

				<p>Nelayan Yang Dibentuk Dikarenakan Pembentukan kelompok Hanya Didasari Atas Tujuan Yakni Inisiatif Nelayan Jika Membutuhkan Bantuan, Setelah Itu Kelembagaan Nelayan Dalam Bentuk Kelompok Kurang Untuk Dipergunakan Menjadi Wadah Pembelajaran, Dan Bertukar Informasi Bagi Para Nelayan.</p>
4.	Sarif, Danar Aswun, Pterus Kpalet	Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Koja Dai		<p>1.Peran Pemerintah Di Dusun Koja Doi, Telah Efektif Menjalankan Tugasnya Sebagai Pemerintah Khususnya Dinas Perikanan Dan Kelautan Yang Mana Pemerintah Tersebut Telah Memberikan Bantuan Yang Cukup Kepada Masyarakat</p>

				<p>Nelayan Yang Ada Di Dusun Koja.</p> <p>2. Kendala Upaya Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Keterbatasan Anggaran Merupakan Salah Satu Faktor Penting Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Nelayan Didesa Koja Doi, Karena Anggaran Merupakan Faktor Penggerak Seluruh Kegiatan Elemen Lembaga Pemerintah.</p>
5.	Merlin Yulistriani/2013	Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Di Desa Dadap-Indramayu)		<p>Pemerintah Daerah Memiliki Peranan Yang Penting Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Melalui Peningkatan Derajat Pendapatan, Pendidikan, Dan</p>

				Kesahatan.
6.	Tria Maulia,Sylviana Wulandari Rambe, Ester Luvita,Rika Silvia Harahap, Very Hotman Sijabat,Nur Ainun/2022	Analisis Peran Pemerintah Daerah Terhadap Kesejahteraan Nelayan di Sialang Buah Kabupaten Serdang Bedagai	Analisis Interaktif	Peran Pemerintah daerah dalam membantu, memberdayakan ataupun meningkatkan kesejahteraan nelayan yang ada di Desa Sialang Buah terbilang belum optimal dirasakan oleh para nelayan. Hal ini disebabkan masih kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terkait dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh nelayan. Salah satu yang menjadi keluhan nelayan adalah naiknya harga bahan bakar esin sampan mereka.Dalam upaya-upaya untuk mensejahterakan masyarakat nelayan pemerintah

				seharusnya dapat mengambil sikap dengan membuat kebijakan untuk memberdayakan masyarakat pesisir dalam hal meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
7.	Reinaldo Rumulus.Johny Lumolos,Michael Mantin	Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat (Suatu Studi Pada Kelompok Nelayan Di Desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat)		pemberdayaan masyarakat pemerintah desa trikora harus menggunakan cara lain yaitu dengan cara melakukan dan menjalankan program pemberdayaan karena kalau memakai duacara penyelesaian masalah yang sering di pakai oleh desa tidak akan mempan dan masalah ini tidak akan pernah selesai. Pemerintah desa pernah

				mencoba memakai penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan tetapi tidak berhasil jadi pemerintah desa memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara program-program harus di jalankan.
8.	Elvira Ramdayanti, Gilli Argenti, Prilla Marsingga/ 2021	Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang		peran pemerintah bagi para nelayan sudah bisa dikatakan baik dengan adanya program pembinaan, pelatihan, asuransi dan memberikan fasilitas sarana dan prasarana kepada nelayan desa Ciparagejaya.
9.	Eko Sugiharto, Salmani, Bambang Indratno Gunawan/2022	Studi tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Kampung Gurimbang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau		1. Tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan Kampung Gurimbang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau menurut

				<p>indikator tingkat kesejahteraan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diketahui bahwa sebanyak 31 orang responden (94%) nelayan di Kampung berada pada tahap Keluarga Prasejahtera dan sebanyak 2 orang responden (6%) berada pada tahap Keluarga Sejahtera I.</p> <p>2. Berdasarkan analisis tipologi desa diketahui bahwa tipologi masyarakat nelayan Kampung Gurimbang termasuk dalam kategori Kampung Swakarya.</p> <p>3. Berdasarkan analisis pohon masalah diketahui</p>
--	--	--	--	---

				<p>ada beberapa masalah yang menjadi penyebab utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan meliputi modal, harga dan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM). Selanjutnya diperoleh alternatif solusi menurut masyarakat meliputi peningkatan akses modal melalui pengumpul (punggawa) dan kelompok serta pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) khusus bagi masyarakat nelayan.</p>
10.	Rusman/2022	Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Memberdayakan		Peran pemerintah kelurahan yang telah membantu

		<p>n Masyarakat Nelayan di Jampue Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)</p>	<p>kehidupan masyarakat jampue baik yang melalui pemberdayaan seperti adanya program-program nelayan seperti pelatihan, sosialisasi dan bantuan yang telah di bentuk oleh pemerintah walaupun belum sepenuhnya maksimal bagi seluruh masyarakat nelayan di jampue dalam memberdayakan masyarakat nelayan di jampue berdasarkan prinsip ekonomi syariah yaitu pemerintah kelurahan telah membantu kemaslahatan umat, adil, jujur dalam mengolah data dana bantuan nelayan dan amanah dalam menyalurkan bantuan.</p>
--	--	--	--

C. Kerangka Pikir

Pertumbuhan ekonomi sangat penting karena ekonomi menitik beratkan pada terpenuhinya kebutuhan individu dalam masyarakat. Ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila mampu mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Laju pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi dimana pembangunan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan faktor pertambahan penduduk dan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu Negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu Negara.

Dengan pembangunan ekonomi yang baik akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi, dan dengan pembangunan ekonomi yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah secara menyeluruh diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat yang berdampak pada peningkatan produktifitas perikanan dan kelautan di Desa Corawali pada masa yang akan datang. Analisis sektor basis merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah sektor tersebut merupakan sektor basis, kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan perekonomian daerah yang bersangkutan.

Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan peran dan dukungan dari

pemerintah agar suatu daerah dapat memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Adapun peran pemerintah yang dimaksud adalah:

a. Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai *Regulator* adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai *regulator*. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala menurutkegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

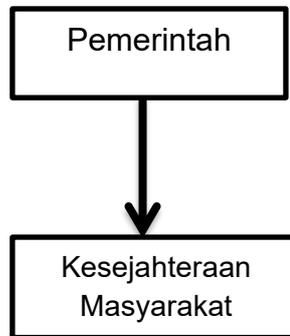
b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai *Dinamisator* adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai *Fasilitator* adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang bersifat analisis deskriptif kualitatif. Analisisnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam. Jenis penelitian ini juga berupa metode penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa berupa individu atau kelompok. Sebagaimana ditunjukkan Sujarweni,(2014: 19) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu teknik pemeriksaan yang menghasilkan informasi grafis sebagai wacana atau komposisi dan perilaku individu yang diperhatikan. Penelitian kualitatif diandalkan untuk memiliki pilihan untuk menciptakan gambaran luar dan dalam wacana, penyusunan, serta perilaku yang dapat dilihat dari individu tertentu, atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui dampak dari peranan Pemerintah desa terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

C. Situs dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Dengan alasan Desa Corawali merupakan daerah

dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan yang dijadikan sebagai satu-satunya mata pencaharian masyarakat. Menjadikan peneliti memilih lokasi tersebut. Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian ini membutuhkan waktu 2 bulan terhitung Mei-Juni 2023.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata pendekatan terhadap data kualitatif adalah melalui pengamatan dan pencatatan. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sebenarnya, jenis data kualitatif sangat beragam. Namun, yang paling sering digunakan adalah pengelompokan menurut teknik pengumpulan data. Perlu diingat, teknik pengumpulan data ini sangat eksploratif. Artinya, diperlukan analisis dan penelitian mendalam dalam untuk bisa mendapatkan data yang sesuai. Berikut adalah jenis-jenis data kualitatif menurut teknik pengumpulannya.

- a. Wawancara
- b. Pечатatan
- c. Observasi
- d. Studi kasus
- e. Dokumentasi

Adapun sumber data yang dikumpulkan didalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber utama (tanpa melalui perantara). Data primer diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung (observasi). Data primer pada penelitian ini

didapatkan dari narasumber langsung dari masyarakat Desa Corawali yang berprofesi sebagai nelayan.

2. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung seperti dari arsip-arsip dokumen, buku-buku, dan artikel ilmiah sebagai penunjang pada penelitian ini.

E. Informan Penelitian

Teknik penelitian informan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik mengambil informan yang dilakukan secara purposive yaitu cara penarikan informan yang dilakukan untuk memilih subjek yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan yang diperlukan dalam penelitian.

Informan dalam penelitian ini merupakan orang atau pelaku yang benar-benar tahu mengenai masalah yang terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

No.	Kategori Informan	Jumlah
1.	Pemerintah Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru	2
2.	Nelayan Desa Corawali	3

E .Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan berbagai teknik,yaitu dokumentasi dan teknik wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait.

1. Observasi

Observasi adalah pengambilan data dengan menggunakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Dapat diteliti dari perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian sistematis tanpa adanya proses tanya jawab dengan individu-individu yang diteliti, tujuan dari observasi adalah untuk menggambarkan sesuatu yang berhubungan dengan penelitian.

2. Wawancara

Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur wawancara terstruktur adalah wawancara yang ditetapkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh pewawancara. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah kegiatan wawancara mengalir seperti biasa, yaitu mengikuti dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi responden.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya. (Suharsimi Arikunto, 2014:206) Sedangkan dokumen adalah bahan tertulis yang dibutuhkan peneliti

yang dimanfaatkan sebagai dokumen yang berarti barang-barang penguji, menafsirkan dan bukti konkret data yang diperoleh di lapangan.

F. Metode Analisis Data

Pada penelitian kualitatif, analisis data telah dimulai pada saat peneliti terjun ke lokasi untuk melakukan pengumpulan data di lapangan yaitu pada saat peneliti melakukan observasi (observation), wawancara (interview), mempelajari dokumen (document) atau melakukan perekaman (recording) terhadap peristiwa atau kegiatan yang diteliti. Pada saat peneliti menerima data pertamanya, maka sudah harus berusaha untuk mengidentifikasi masalah dan konsep yang muncul dari proses pengumpulan data yang akan membantunya dalam memahami situasi yang tengah dipelajari.

Pada saat proses pengumpulan data (data collection) berlangsung, sebagaimana dikemukakan Miles dan Huberman (1994), proses analisis data kualitatif juga berlangsung yang terdiri atas tiga tahap, yaitu: 1) reduksi data (data reduction); 2) tampilan data (data display); dan 3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion and verification).

Berikut ini adalah langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Reduksi data

Miles dan Huberman (1994) menjelaskan reduksi data (data reduction) sebagai berikut “reduksi data mengacu pada proses pemilihan, pemutusan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan

transformasi data yang muncul dalam catatan tertulis atau transkripsi. “Dengan demikian reduksi data mencakup kegiatan seperti memilih (*selecting*) yaitu menentukan nama data yang penting, mana yang tidak penting; memberikan focus perhatian (*focusing*) pada data tertentu; menyederhanakan (*simplifying*) terhadap data, misalnya keterangan yang rumit, berbelit-belit, panjang atau bertele-tele; merumuskan suatu gagasan umum (*general idea*) yaitu gambaran umum atau gambaran ringkas (*abstracting*) terhadap fenomena yang tengah diteliti; mengubah gagasan atau gambaran umum kedalam bentuk tampilan data (*transforming*).

2. Penyajian data (*data display*)

Tampilan data adalah elemen atau level kedua dalam model analisis data kualitatif. Tampilan data berjalan selangkah diluar reduksi data untuk menyediakan “kumpulan informasi terkompresi yang memungkinkan penarikan kesimpulan”. Tampilan data dapat berupa table, bagan (*chart*) atau kalimat kesimpulan sementara. Tampilan data memberikan suatu cara dalam menyusun data berpikir tentang isi data dalam tampilan yang lebih mudah dibaca (lebih tekstual). Menampilkan data baik dalam bentuk kata, kalimat atau diagram, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi data secara cukup memadai untuk mulai melihat pola sistematis dan hubungan timbal balik. Pada tahap tampilan, berapa tema tambahan dapat muncul dari data yang sebelumnya tidak ditemukan dalam proses awal reduksi data.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) merupakan elemen ketiga dari analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan mencakup kegiatan meninjau ulang kembali hasil data dan menilai implikasi dari makna yang muncul terhadap pertanyaan penelitian. Verifikasi, secara integral terkait dengan penarikan kesimpulan, yaitu melakukan peninjauan kembali terhadap data sebanyak yang diperlukan untuk mengecek silang atau memverifikasi kesimpulan sementara yang muncul.

Dengan demikian, penarikan kesimpulan merupakan tahap untuk memberikan makna terhadap data (*give meaning*): melakukan konfirmasi (*confirming*) apakah makna yang diberikan sudah tepat dan yang terakhir melakukan verifikasi (*verifying*) yaitu memeriksa kembali data untuk memastikan makna yang diberikan sudah selesai.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran umum Kabupaten Barru

Kabupaten barru adalah salah satu kabupaten yang terletak di pesisir pantai barat Provinsi Sulawesi Selatan dengan garis pantainya 78 Km. Kabupaten Barru secara administratif terbagi atas 7 Kecamatan dengan batas-batas wilayah. Sebelah utara berbatasan dengan kota Parepare dan Kabupaten Sidrap, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pangkep dan Kepulauan, sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Secara administratif kecamatan yang ada di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Luas Kabupaten Barru

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas	
			Km2	%
1	Tanete Riaja	7	174,29	14,84
2	Tanete Rilau	10	79,17	6,74
3	Barru	10	199,32	16,97
4	Soppeng Riaja	7	78,90	6,72
5	Mallusetasi	8	216,58	18,44

6	Pujananting	7	314,26	25,75
7	Balusu	6	112,20	9,55
Total		55	1.174,72	100%

Sumber data : Kabupaten Barru dalam Angka 2015

Secara geografis Kabupaten Barru terletak diantara Koordinat 4°0.5'35" - 4°47'35" Lintang Selatan dan 119° 35' 00" Bujur Timur dengan luas wilayah 1.174,72 km² (117.472 Ha) dan berada ± 102 km disebelah utara Kota Makassar Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat ± 2,5 jam. Kabupaten Barru berada di antara Kota Makassar dan Kota Pare-pare dan merupakan jalur perlintasan trans sulawesi.

2. Aspek Kependudukan

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi interim 2020-2023 sebanyak 186.910 jiwa yang terdiri atas 91.453 jiwa penduduk laki-laki dan 95.457 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan hasil sensus penduduk 2020 penduduk Kabupaten Barru mengalami pertumbuhan sebesar 0,74 %. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 95,81.

b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Barru tahun 2022 mencapai 159,11 jiwa/Km². Kepadatan di 7 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan tanete rilau dengan kepadatan

sebesar 473,44 jiwa/Km² dan terendah di Kecamatan Pujananting sebesar 41,69 jiwa/Km²

3. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Tanete Rilau

a. Gambaran Umum Kecamatan Tanete Rilau Berdasarkan data BPS

kecamatan Tanete Rilau terdiri dari 10 desa, luas Kecamatan ini Hanya 79,17Km² atau 6,74%. Kecamatan ini merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil di Kabupaten Barru. Desa yang memiliki wilayah terluas adalah desa Lipukasi dengan luas wilayah 15,44 Km² . sebelah utara kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Barru, sedangkan sebelah selatannya berbatasan dengan Kabupaten Pangkep, Di sebelah barat bebatasan dengan Selat Makassar, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanete Riaja.

Semua Desa di Kecamatan ini telah berstatus sebagai Desa Definitif, dari 10 desa yang ada hamper rata-rata wilayah desa yang ada di Kecamatan Tanete Rilau terletak didataran rendah.

Tabel 4.2 Luas wilayah Tanete Rilau

Desa	Luas (Km ²)	Letak
(1)	(2)	(3)
Lasitae	7,70	Pantai
Pancana	9,20	Pantai
Lalabata	12,00	Bukan Pantai
Corawali	7,92	Pantai
Tellumpanua	6,65	Pantai
Lalolang	2,05	Pantai
Tanete	4,10	Pantai
Lipukasi	15,44	Pantai
Garessi	4,81	Pantai
Jumlah	112,20	

Sumber : Tanete Rilau Dalam angka 2013

b. Kepadatan Penduduk

Hasil pencatatan registrasi penduduk pada tahun 2012, Kecamatan Tanete Rilau Merupakan Kecamatan terbesar kedua penduduknya setelah Kecamatan Barru. Presentasinya mencapai 19.74 persen. Jumlah penduduknya sebanyak 33.175 jiwa, dengan kepadatan penduduk 418 jiwa/Km².

1. Gambaran Umum Kantor Desa

Kantor Desa adalah pusat pelayanan di Desa, menjadi central segala kegiatan yang ada di Desa, baik itu di bidang pemerintahan, pemberdayaan, pembangunan ataupun pembinaan semua berpusat di Kantor Desa. Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 di akhir masa jabatan presiden DR.H.Susilo Bambang Yodhoyono disusun dengan semangat dan penerapan amanat konsitusi yaitu dengan ketentuan pasal 18B ayat (2) UUD tahun 1945.

- a. Kantor Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Kabupaten Barru.
 1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
 2. Bupati adalah Bupati Barru.
 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 5. Standar Operasional Prosedur adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan

acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

7. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintahan dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

8. Badan Publik adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barru dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan

informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud pada Peraturan ini.

10. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit/lembaga dilingkup Pemerintah Kabupaten Barru.

12. Meja Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik.

13. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

14. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

15. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Visi Misi Desa Corawali

a. Visi

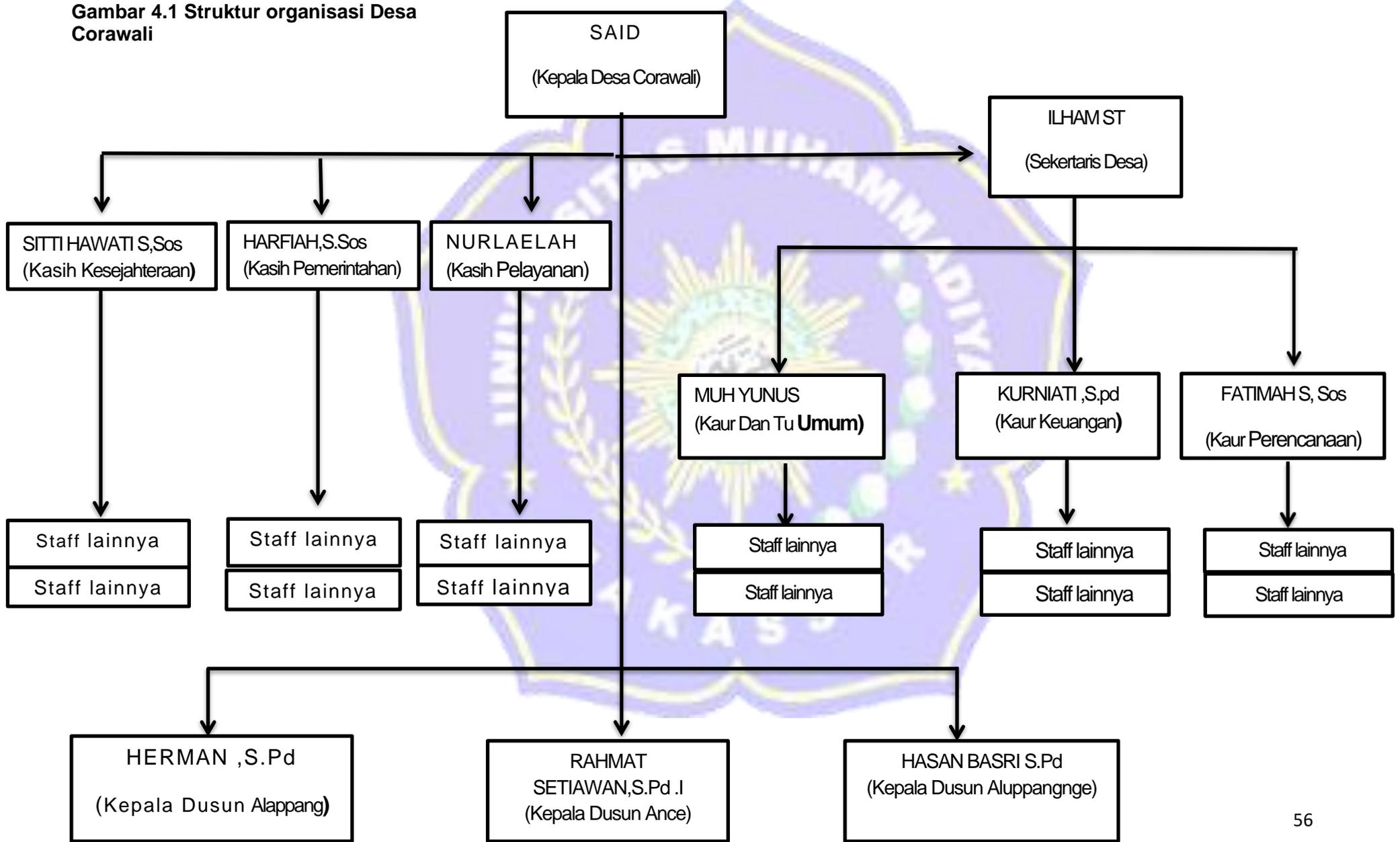
"Mewujudkan Desa Corawali yang Lebih Baik, Sejahtera, Taat Azaz, dan Bermartabat"

b. Misi

1. Meningkatkan Pelayanan masyarakat dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa.
2. Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisema SDM Masyarakat Desa
3. Mengembangkan sinergitas antar wilayah desa serta keterpenuhan sarana dan prasarana pengembangan wilayah, ekonomi, sosial budaya di desa.
4. Menciptakan lingkungan yang kondusif



Gambar 4.1 Struktur organisasi Desa Corawali



B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Berdasarkan penelitian yang di lakukan dengan menggunakan metode wawancara kepada salah satu pegawai Kantor Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, maka di ketahui Jumlah pegawai yang ada di Kantor Desa Corawali Berjumlah 19 orang.

1. Kantor Desa Corawali
2. Kasi Kesejahteraan
3. Kasi Pemerintahan
4. Kasi Pelayanan
5. Kaur Tu & Umum
6. Kaur Keuangan
7. Kaur Perencanaan

Penelitian ini menggunakan metode wawancara, jumlah sampel atau responden yang peneliti jadikan sebagai data primer yang menjadi sumber data utama yakni sebanyak 2 orang.

Tabel 4.1 Jumlah Informan

Nama	Jabatan	Pendidikan terakhir
ILHAM ST	Sekretaris Desa	S1
ST.HAWATI S.Sos	Kasi Kesejahteraan	S1

2. Kondisi Prekonomian Masyarakat Nelayan Di Desa Corawali Kabupaten Barru

Tabel 4.2 Data Mata Pencaharian Masyarakat

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pengawai negeri sipil (PNS)	25
2	Karyawan swasta	25
3	Nelayan	95
4	Petani	95
5	Pedagang	4
6	Karyawan Swasta	25
7	Karyawan honorer	10
8	Sopir	8
9	Pensiunan	8
10	Tentara nasional Indonesia	3
11	Buruh lepas harian	2
12	Buruh nelayan/perikanan	2
13	Buruh tani/perikanan	1
14	Perangkat desa	1
15	Perawat	1
16	Dosen	1
17	Konstruksi	1

Sumber Data : Data Primer (Hasil Observasi Wawancara, 2023)

Berdasarkan table 4.2 menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat di Desa Corawali khususnya di dusun alupppangnge adalah sebagai nelayan, dengan di dukung oleh wilayah yang berada di pinggir laut menjadikan sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah pada saat itu sehingga tidak ada pilihan lain bagi mereka selain menjadi seorang nelayan.

Hal lainnya disebabkan karena bagi sebagian masyarakat menganggap pendidikan bukanlah hal yang utama. Sehingga setelah lulus sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas mereka memilih menjadi seorang nelayan mengikut dengan orang tua mereka yang lebih dulu menggeluti profesi tersebut seperti yang dijelaskan oleh sekretaris Desa Corawali bapak Ilham ST bahwa:

“jika dilihat dari pembagian wilayah desa corawali terkhususnya di dusun aluppangnge mayoritas penduduknya adalah nelayan, hal ini di dukung oleh kondisi tempat tinggal masyarakat yang berada dekat dengan pesisir laut. Dimana hal tersebut memudahkan mereka jika ingin melakukan aktivitas menangkap ikan, selain karena faktor tersebut masyarakat yang sekarang berprofesi sebagai nelayan memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki kelebihan lain untuk mencari pekerjaan sehingga menjadi nelayan adalah solusi bagi mereka agar tetap bekerja dan menghasilkan pendapatan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.”

Berdasarkan hasil informasi yang di dapatkan dari perangkat desa dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk di desa Desa Corawali khususnya di dusun aluppangnge adalah sebagai nelayan. Seperti yang disampaikan oleh responden pertama menyampaikan bahwa :

”Pak darwis menyampaikan bahwa sejak ia tammat sekolah, ia memilih menjadi seorang nelayan untuk membantu prekonomian keluarga, juga karena tidak ada pilihan pekerjaan lain dan kurangnya skill dimiliki sehingga tidak ada pilihan lain bagi bapak darwis selain menjadi seorang nelayan dan

menggantikan orang tuanya yang sepuh. Pak darwis juga menyampikan bahwa sudah ada sekitar 10 tahun ia bekerja sebagai nelayan.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh responden ke dua yang juga merupakan seorang nelayan menyampaikan bahwa :

“Menjadi seorang nelayan adalah pekerjaan yang telah ia tekuni saat usianya masih remaja hingga saat ini, pak asdar sudah menikah dan memiliki 4 orang anak, namun masih menjadi seorang nelayan karena tidak ada pekerjaan lain yang bisa ia kerjakan sehingga sampai saat ini menjadi seorang nelayan adalah pilihan satu-satunya bagi pak asdar agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan 3 orang anak yang masih menjadi tanggungannya.”

Berdasarkan dari hasil kedua wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa menjadi seorang nelayan adalah sumber penghasilan utama bagi masyarakat khususnya yang berada di dusun aluppangnge untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama satu priode atau bulan, penghasilan yang di dapatkan biasanya dipergunakan untuk kebutuhan keluarga seperti komsumsi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang bersifat material.

Kesejahteraan menurut BAPPENAS: Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki- laki dan perempuan mampu memenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui status ekonomi masyarakat Di Desa Corawali adalah :

1. Pendapatan

Pendapatan ialah penghasilan yang didapatkan oleh kepala rumah tangga ataupun anggota keluarga, melalui pekerjaan yang dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dalam satu bulan. Penghasilann biasanya digunakan untuk kebutuhan keluarga seperti komsusmsi, pendidikan maupun kesehatan.

Berkaitan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan, dimana tidak selamanya seorang nelayan dapat melaut karena disebabkan kondisi cuaca yang tidak mendukung. Mengharuskan nelayan menunda untuk mencari tangkapan ikan hingga cuaca kembali normal dan memungkinkan bagi para nelayan untuk kembali melaut. Sebagaimana hal yang disampaikan oleh responden pertama dan ke dua bahwa:

“Jika Musim Hujan mereka tidak pergi melaut biasanya sampai sehari-hari kadang sampai 1 minggu bahkan sampai 1 bulan, ia juga menyampaikan bahwa jika para nelayan tidak pergi melaut tidak ada pekerjaan lain yang mereka kerjakan karena melaut adalah pekerjaan utama. Selama tidak melaut biasanya nelayan hanya di rumah memperbaiki troll (jala), atau sesekali memeriksa keadaan kapal dan membersihkan kapal hanya aktivitas seperti itu yang nelayan lakukan sampai mereka bisa melaut kembali. “

Berdasarkan hasil pemaparan dari wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pendapatan yang diperoleh oleh nelayan

dalam memenuhi kebutuhan keluarga belum cukup, karena terkadang pendapatan yang diperoleh tidak menentu.

Seperti yang disampaikan kembali oleh responden pertama yakni bapak darwis bahwa:

“pak darwis memilih turun ke laut di pagi hari jadi setelah subuh ia berangkat dan pulang di sore hari . Pak darwis menyampaikan bahwa pendapatan yang ia dapatkan tidak menentu tergantung dari hasil tangkapan yang ia peroleh tak jarang hanya cukup untuk membeli solar untuk di pakai lagi di hari esok jika ia turun melaut , pak dariws juga menyampaikan bawah kadang ia tidak memperoleh hasil tangkap yang banyak sehingga jika dijual tidak memberi, jadi biasanya tangkapan tersebut hanya untuk di konsumsi oleh keluarganya.”

Berbeda halnya dengan yang sampaikan juga oleh responden ketiga yakni bapak hedar yang juga merupakan seorang nelayan bahwa:

“Pak hedar memilih pergi melaut pada waktu malam sesudah atau sebelum magrib, ia mengatakan bahwa biasanya ia memperoleh banyak ikan ia juga menjabarkan mengenai perbedaan hasil tangkap antar nelayan yang melaut pagi dan malam. Kalau perbedaan pendapatan yang pergi pagi dengan malam beda-beda tipis masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Ia menyampaikan bahwa banyak sekali faktor yang mendasari hasil tangkap yang diperoleh seperti

kualitas jala yang digunakan, kemampuan mesin dan jarak tempuh melaut.”

Hal lain di sampaikan oleh responden ke dua yakni bapak asdar bahwa:

“Ia menyapikan bahwa pendapatan yang ia dapat tergantung dari kondisi cuaca dan ikan serta jarak tempuh melaut , kalau sementara pasang jala langsung hujan dan angin kencang biasanya ia terkendala untuk mencari ikan, tak jarang pak asdar pulang dengan belum mendapatkan ikan kalau pun ada hanya sedikit tidak cukup untuk dijual. Pendapatan nelayan biasa Rp. 500.000 – Rp.1.000.000 kalau cuaca mendukung kalau tidak biasa tidak sampai Rp.500.000.”

Berdasarkan data dari semua wawancara dan juga observasi yang telah peneliti laksanakan dapat di pahami bahwa penghasilan masyarakat nelayan berkisar Rp.500.000 sampai dengan Rp. 1.000.000 dimana juta juta rupiah sudah tergolong pendapatan yang tinggi bagi seorang nelayan. Dari hasil observasi yang di dapatkan oleh peneliti dapat diketahui bahwa pendapatan nelayan khususnya ada berada di dusun aluppangnge berada pada tingkat rendah ke menengah tergantung dari kondisi yang ada.

3.Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat nelayan dalam mencapai kesejahteraan oleh pemerintah Desa Di Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupeten Barru.

Sesuai dengan tujuan adanya pemberdayaan tidak hanya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, tetapi juga meningkatkan harkat dan martabat, kepercayaan dan harga diri, serta menjaga nilai budaya masyarakat. Gerakan dalam pembangunan terletak pada potensi dan kemauan untuk keluar dari garis kemiskinan yang menyerang masyarakat atau kelompok masyarakat yang majemuk. Inovasi kreatif untuk lingkungan tentunya menjadi dasar untuk menginisiasi pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya ikan, Dan Petambak Garam Pasal 3 menyatakan bahwa perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk :

- a. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya ikan, dan Petambak Garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelesatarian lingkungan;
- d. Menumbuh kembangkan system dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;

- e. Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta perenanaan; dan
- f. Memberikan jaminanana dan keselamatan serta bantuan hukum”.

Berdasarkan data dari hasil observasi dapat dilihat faktor-faktor pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan Pemerintah Desa untuk masyarakat nelayan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat nelayan di Desa Corawali untuk melindungi masyarakat nelayan oleh pemerintah desa dengan menjalankan UU No. 7 Tahun 2016 dengan berupaya untuk melindungi ekonomi yang lemah melalui kebijakan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Adapun perubahan yang terlihat setelah adanya pemberdayaan nelayan di Desa Corawali yaitu:

1. Faktor Kesejahteraan

Berdasarkan data dari hasil wawancara Pemerintah Kelurahan mengeluarkan dampak adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat guna membantu para nelayan seperti meningkatkan kesejahteraan nelayan. Seperti halnya yang dijelaskan kembali oleh sekretaris desa corawali dari hasil keterangan wawancara peneliti bahwa:

“Dengan adanya pemberdayaan nelayan melalui bantuan, pelatihan maupun pengajaran yang langsung disampaikan oleh dinas perikanan Kabupaten Barru yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa. besar harapan kami hal ini dapat memberi dampak yang baik serta menjadi wawasan dan pengetahuan baru bagi masyarakat nelayan.”

Hal lain juga disampaikan oleh Staf Desa Corawali mengenai pemberdayaan masyarakat nelayan.

“Pemberdayaan masyarakat nelayan ini tidak hanya terfokus pada nelayan saja, tapi juga pada istri-istri mereka hal ini kami lakukan dengan harapan pelatihan seperti membuat abon ikan dan olahan ikan yang lain yang diajarkan kepada istri para nelayan ini dapat membantu prekonomian keluarga khususnya keluarga yang berlatar belakang sebagai nelayan agar lebih sejahtera.”

Dengan adanya pemberdayaan nelayan dapat membuka wawasan dan pengetahuan untuk masyarakat nelayan. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan nelayan ini merupakan tugas untuk pemerintah desa untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat nelayan di desa corawali, dengan ini masyarakat nelayan dapat merasakan dampak dari kebijakan pemberdayaan nelayan tersebut. Seperti peningkatan kesejahteraan keluarga dan lain sebagainya.

Dari hal yang disampaikan oleh sekretaris desa dan stafnya tidak dapat pungkiri bahwa nelayan sudah merasakan dampak pemberdayaan nelayan dengan bertambahnya sedikit pendapatan yang didapatkan. Hal ini disampaikan oleh responden kedua yakni bapak asdar mengatakan bahwa:

“Ia menyampaikan bahwa sejak adanya pemberdayaan nelayan ini membantu dalam meningkatkan pendapatan yang ia peroleh karena adanya bantuan mesin yang memadai. Ia juga mengatakan bahwa

kemarin pak asdar ini tidak bisa melaut terlalu jauh karena mesin yang ia miliki tidak memungkinkan untuk melaut dengan jarak yang jauh , kalau sekarang ia bisa melaut dengan jarak yang jauh.”

Hal yang sama disampaikan oleh bapak hedar respon ke tiga mengatakan bahwa:

“ Bahwa dirinya mendapatkan bantuan pemberdayaan nelayan, yakni pemberian modal untuk memperbaiki bagian kapalnya yang rusak, ia mengatakan bahwa kapal yang ia miliki sudah tua jadi ada beberapa bagian yang (rapuh). Ia juga mengatakan bahwa saat ini sudah tidak cemas saat melaut karena kapal yang ia miliki telah diperbaiki bagian yang rusak.”

Berdasarkan dari jawaban diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya pemberdayaan masyarakat nelayan para nelayan dapat meningkatkan pendapatan, pengetahuan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa dampak dengan adanya kebijakan pemberdayaan nelayan juga berdampak dengan keadaan social masyarakat nelayan seperti tingkat kesejahteraan keluarga nelayan sehingga mereka dapat membiayai pendidikan anak dan kebutuhan pokok dalam sehari-hari.

4. Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Di Desa Corawali

Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di perikanan dan kelautan sangat penting untuk dilakukan. Hal ini karena pemerintah memiliki kewenangan untuk terus mendorong pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan memungkinkan mereka untuk mandiri dan hidup jauh dari pemerintah. Oleh karena itu pemberdayaan dapat mendorong kemandirian masyarakat, pembangunan menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan dengan konsekuensi dan keterbatasan pembangunan dan pemberdayaan pemerintah masyarakat dapat hidup perlahan dan mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sama halnya yang diungkapkan oleh sekretaris desa corawali Bapak Ilham ST. Hasil keterangan wawancara peneliti bahwa:

“Kami selaku pemerintah desa yang paling dekat dengan masyarakat akan memaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan dari kami, kami juga akan memfasilitasi seperti pembuatan proposal apabila proposal tersebut disetujui oleh dinas perikanan dan kelauran, akan disalurkan langsung kepada nelayan dalam bentuk bantuan seperti, Jps, jarring, mesin, perahu dan lain sebagainya. “

Disampaikan juga oleh kasi kesejahteraan yakni Ibu Sitti. Hawa S.Sos bahwa :

“Pemberdayaan nelayan yang kami laksanakan di mulai dari nelayan kecil, nelayan tradisional dan para pemelik kapal yang memiliki ketentuan dengan ukuran kecil yang memenuhi standard yang berlaku.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa. Pemerintah desa mengeluarkan kebijakan bahwa bantuan hanya melalui proposal yang telah ditelaah disusun bersama dengan masyarakat nelayan. Pemberdayaan ini dilakukan mengingat nelayan merupakan masyarakat kecil yang membutuhkan uluran tangan dari pemerintah dalam hal ini khususnya pemerintah desa yang paling dekat dan paling tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat nelayan yang ada di desa corawali melalui bantuan dan pemberdayaan yang akan terus dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Peran adalah aspek dinamis dari posisi (Status).ketika orang menjalankan kewajibannya sesuai dengan posisinya, mereka menjalankan perannya. Adapun upaya peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat nelayan terdapat pada tiga aspek dimensi peran :

1. Kebijakan

Kebijakan atau aturan yang dikeluarkan melalui hasil musyawarah atau kesepakatan oleh pemerintah kelurahan dan dinas perikanan dan kelautan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan di desa corawali khususnya di dusun alupangnge agar pendapatan masyarakat nelayan dapat meningkat. Karena kebijakan tersebut merupakan hasil musyawarah pemerintah desa dan dinas perikanan sehingga terjadi kesepakatan untuk memberikan sebuah bantuan kepada masyarakat nelayan.

Berdasarkan “ Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya ikan, Dan Petambak Garam

Pasal 3 menyatakan bahwa perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk :

- a. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya ikan, dan Petambak Garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelesatarian lingkungan;
- d. Menumbuh kembangkan system dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- e. Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta perencanaan; dan
- f. Memberikan jaminan dan keselamatan serta bantuan hukum”.

Berdasarkan data dari hasil wawancara peneliti bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan serta Pemerintah Desa Corawali bekerja sama dalam membantu masyarakat nelayan yang ada di desa corawali dengan mengeluarkan sebuah kebijakam seperti pengadaan proposal. Kebijakan Proposal yang dikeluarkan ini untuk proses mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah. Maka dari itu masyarakat nelayan harus membentuk kelompok nelayan minimal 10 orang anggota kelompok agar bantuan tersebut bisa dikeluarkan.

Adapun hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa agar mendapat bantuan tersebut antara lain:

1. Proposal

Bentuk kebijakan ini merupakan syarat dari pemerintah desa dan dinas perikanan dan kelautan untuk masyarakat nelayan di desa corawali agar berkesempatan mendapatkan bantuan nelayan.

2. Strategi

Strategi yang dijalankan pemerintah khususnya pemerintah daerah kabupaten barru dalam pemberdayaan masyarakat nelayan adalah dengan mengoptimalkan kegiatan yang ada dengan bertujuan tersedianya sarana perikanan tangkap nelayan kecil dan terlaksananya pendampingan kelompok usaha bersaa (KUB) nelayan kecil.

Pemerintah desa menyusun strategi pemberdayaan masyarakat nelayan di desa corawali bertujuan untuk memandirikan masyarakat agar terhindar dari kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Adapun kegiatan yang dilakukan pemerintah Desa Corawali untuk nelayan seperti:

a. Sosialisasi Penggunaan alat tangkap

Pemerintah Desa Corawali dalam menjalankan tugas untuk pemberdayaan masyarakat nelayan telah melakukan sosialisasi penggunaan alat tangkap kepada nelayan agar diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya dan sisi lain juga tetap menjaga laut agar tetap lestari.

Hal ini disampaikan oleh Sekertaris Desa Corawali Illham ST mengatakan bahwa :

“Ia mengatakan bahwa istilah KUB (Kelompok Usaha Bersama) dan kita melakukan sosialisasi alat tangkap dengan menggunakan alat dan teknologi modern. Ini merupakan salah satu upaya agar nelayan dapat menggunakan cara cara yang modern dan lebih efektif.”

Kelompok usaha bersama (KUB) merupakan kelompok yang terdiri dari beberapa masyarakat nelayan yang ada di jampue diberikan sosialisai penggunaan alat tangkap yang modern seperti GPS dan alat seperti roket yang bertujuan agar menangkap ikan lebih efektif dan efisien.

Strategi ini bertujuan untuk memkasimalkan pendapatan masyarakat nelayan dengan menjual langsung hasil tangkapan sehingga harga ikan tersebut juga masih normal dan memiliki nilai tambah di mata pembeli.

b. Pendampingan Nelayan

Pemerintah desa akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat nelayan, dengan adanya pendampingan kepada nelayan untuk dapat mendapatkan fasilitas dan bantuan lain dari pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Pusat. Hal tersebut disampaikan oleh Kasih Kesejahteraan Desa Corawali Sitti Hawa,S.Sos, mengatakan bahwa :

“Kami mengupayakan agar dapat memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam memperoleh bantuan dan fasilitas baik

pengadaan yang ada di daerah ataupun bantuan dari pusat dan izin-izannya.”

Dari penjelasan hasil wawancara diatas, sinergi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat terjalin dengan baik dimana pemerintah memberikan sosialisasi dan pendampingan sedangkan masyarakat juga melaksanakan haknya dengan baik sesuai prosuder guna dapat meningkatkan kualitas pendapatan masyarakat nelayan.

C.PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan di desa corawali dengan mengambil sampel di dusun aluppangnge terkait dengan peran pemerintah desa corawali dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan . Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan di lapangan dari 5 orang yang di dapatkan dua orang Staf Desa Corawali dan tiga orang dari masyarakat nelayan. Adapun peran dari Pemerintah Desa Corawali terkait dengan upaya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan yakni pemerintah desa menerbitkan kebijakan pembuatan proposal bagi para nelayan yang nanti akan mendapatkan bantuan dari Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Barru dimana bantuan tersebut, terdiri dari jala, Jps, mesin, maupun bantuan dalam bentuk uang tunai.

Selain kebijakan pembuatan proposal, pemerintah desa juga melakukan sosialisai dan pendampingan pemberdayaan masyarakat nelayan seperti diadakannya pelatihan dan pengajaran kepada nelayan tentang cara

menggunakan alat tangkap serta cara-cara yang lebih modern namun tetap menjaga kelestarian laut.

Upaya pemberdayaan nelayan demi meningkatkan kesejahteraan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang bekerja sama dengan Dinas perikanan Dan Kelautan Kabupaten Barru. Memberikan dampak yang baik bagi masyarakat nelayan sejak adanya program-program yang dijalankan masyarakat turut merasa terbantu dan merasakan perbedaan hasil tangkapan yang mereka dapatkan, sehingga hal tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat nelayan di desa corawali yang secara tidak langsung telah memberikan kemudahan bagi nelayan dalam menjalankan pekerjaan mereka.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu Rusma dengan judul penelitian Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Pinrang. Tentang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, kabupaten dan daerah. Dalam memberdayakan masyarakat nelayan agar keluar dari garis kemiskinan dan mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Sesuai dengan UU Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya ikan, Dan Petambak Garam Pasal 3 menyatakan bahwa perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk :

- a. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;

- c. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya ikan, dan Petambak Garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelesatarian lingkungan;
- d. Menumbuh kembangkan system dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- e. Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta perenanaan; dan
- f. Memberikan jaminana dan keselamatan serta bantuan hukum;



BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

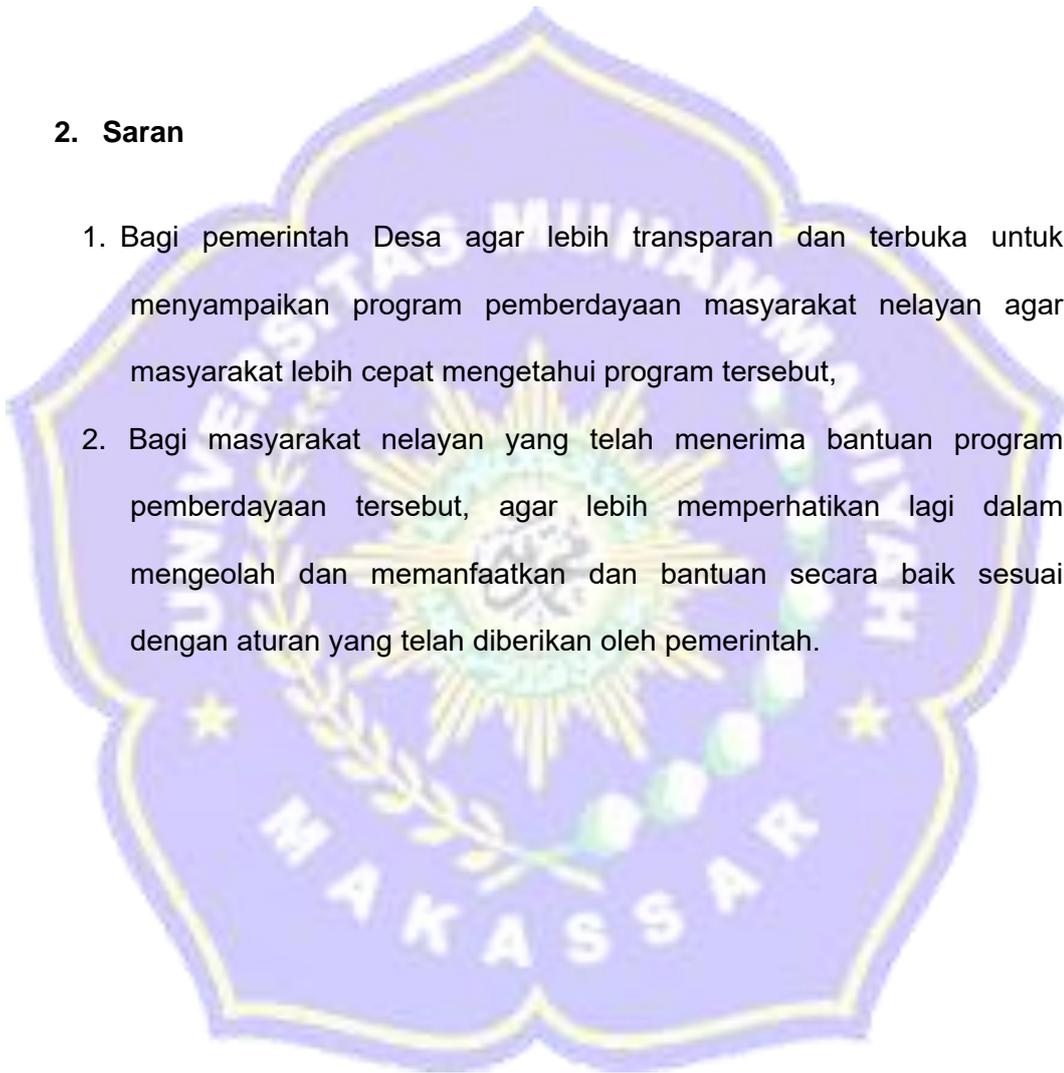
Setelah penulis menguraikan dengan jelas dalam pembahasan yang merupakan pokok-pokok permasalahan dari skripsi yang penulis susun, dari permasalahan tersebut maka di simpulkan.

1. Kondisi perekonomian masyarakat di Desa Corawali dalam memperbaiki keadaan ekonomi keluarga dimana sumber pendapatnya berasal dari, petani, pedangang, Pns atau pekerjaan lainnya. Akan tetapi masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Corawali sebagai pendapatannya berasal dari nelayan. Pendapatan masyarakat nelayan di Desa Corawali dapat digolongkan keluarga sejahtera II dimana selain dapat memenuhi kebutuhan dasar dan minimalnya dapat menyisipkan uang untuk biaya pendidikan, kesehatan, atupun cicilan mereka. Meskipun pemerintah desa telah membentuk program untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat, namun ini belum berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan masyarakat nelayan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dalam mencapai kesejahteraan oleh pemerintah Desa Corawali dengan adanya program bantuan pemberdayaan masyarakat nelayan yang dikeluarkan oleh pemerintah masyarakat nelayan sangat terbantu dengan adanya program ini dan masyarakat nelayan juga sedikit demi sedikit mampu untuk menyeimbangkan perekonomian.

3. Peran Pemerintah Desa yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan desa Corawali baik yang melalui pemberdayaan seperti program-program nelayan terdiri dari pelatihan, sosialisasi dan bantuan yang telah dibentuk oleh pemerintah walaupun belum maksimal bagi seluruh masyarakat nelayan di Desa Corawali.

2. Saran

1. Bagi pemerintah Desa agar lebih transparan dan terbuka untuk menyampaikan program pemberdayaan masyarakat nelayan agar masyarakat lebih cepat mengetahui program tersebut,
2. Bagi masyarakat nelayan yang telah menerima bantuan program pemberdayaan tersebut, agar lebih memperhatikan lagi dalam mengelola dan memanfaatkan dan bantuan secara baik sesuai dengan aturan yang telah diberikan oleh pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2016). *Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83-103.
- Akram, N. (2022). *Peran Pemerintah Nagran Raya Dalam Penanggulangan Pertambangan Liar Di Kawasan Gunong Kila Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagran Raya* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Aswun, D. & Kpalet, P (2022). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Koja Doi. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(11), 31-35
- Aziz, A. (2022). *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kota Tarakan (Studi Kasus Kelurahan Selumit Pantai)*
- Dahuri,(2014 : 67).*Pengaruh modal kerja, tenaga kerja dan jarak tempuh melaut terhadap pendapatan nelayan di kelurahan lappa kecamatan sinjai utara kabupaten sinjai.skripsi . fakultas ekonomi dan bisnis islam uin alauddin makassar.*
- Damima, J., Pangemanan, F. N. & Waworundeng,W. (2022). *Fungsi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Suatu Studi Kasus: Di Desa Boyongpante Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan). GOVERNANCE*,2(1).
- Dhian. 201:11 . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Perikanan Tangkap Dengan Kapal Motor (Studi Kasus di Kota Bitung, Sulawesi Utara, 2012). Skripsi. Fakultas Ekonomi Atma Jaya Yogyakarta. (tidak dipublikasikan).*
- Dwi 2008 (Widyastuti 2012) *Fungsi pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan (studi kasus: Di Desa Boyongpante Kecamatan Sinonsyang Kabupaten Minahasa selatan) jurnal governance Vol,2. No.1, 2022*
- Iyas, Y. 2014. *Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat. Bandung : Humaniora*
- Karanda, K. O.Pangemanan, F. N., & Kumayas, N. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Inobonto Dua Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow. GOVERNANCE*, 2(1).
- Kusnadi. 2002. *Nelayan; Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial. H*
- Maulia, T. T., Rambe, S. W., Luvita, E., Harahap, R. S., Sijabat, V. H., & Ainun, N. (2022). *Analisis Peran Pemerintah Daerah terhadap Kesejahteraan Nelayan di Desa Sialang Buah Kabupaten Serdang Bedagai. Journal of LagunaGeography*, 1(2).
<https://journal.moripublishing.com/index.php/joulage/article/download/445/126>

- Mukhtar. 2014. *Klasifikasi Jenis Nelayan*
- Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)", *Jurnal Sospol*, Vol 2 No.1 (2016), 103.
- Ramdayanti, E., Argenti, G., & Marsingga, P. (2021). *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 194-201.
- Rumlus, R., Lumolos, J., & Mantiri, M. (2017). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Pada Kelompok Nelayan di Desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat)*. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Rusman, R. (2022). *Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan di Jampue Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah) (Doctoral dissertation, IAIN Parepare)*.
- S. Munawir (2009:10) *Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di kabupaten bulukumba. Skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam uin alauddin Makassar.*
- Said, F. M. A. (2015). *Strategi Pemberdayaan Umkm Pada Dinas Koperindag Kabupaten Maros (Studi Kasus Pada Sektor Perdagangan)*. *Skripsi Universitas Hasanuddin.*
- Smith,. (1983) Sambiring (2015). *Ciri-ciri Nelayan Kecil*
- Sugiharto, E., & Gunawan, B. I. (2022). *Studi tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Kampung Gurimbang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau*. *Jurnal Ilmu Perikanan Tropis Nusantara (Nusantara Tropical Fisheries Science Journal)*, 1(1), 68-74.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sutoro Eko, 2002, *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.*
- Syafiie 2013 ,*Sistem Pemerintahan Indonesia*
- Syafiie, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan pasl 1 ayat 5, *strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan kota tarakan (studi kasus kelurahan selumit pantai) Abdul Aziz.*
- Undang-Undang Repebulik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, www.Hukumonline.com
- Yulistriani, M. (2013). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus di Desa Dadap-Indramayu) (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon*

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pertanyaan untuk Pemerintah Desa Corawali
 - a. Bagaimana kondisi ekonomi, sosial masyarakat desa corawali?
 - b. Masyarakat desa corawali rata-rata bermata pencaharian sebagai apa?
 - c. Faktor apa saja yang menyebabkan sebagian masyarakat memilih profesi sebagai nelayan?
 - d. Bantuan apa yang telah diberikan kepada masyarakat nelayan?
 - e. Bagaimana peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat nelayan?
 - f. Apa saja strategi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat nelayan?
 - g. Program dan kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah desa kepada masyarakat nelayan?
 - h. Apakah tujuan program pemberdayaan masyarakat tersebut?
 - i. Apakah dengan adanya program tersebut dapat membantu nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan?
2. Pertanyaan untuk masyarakat nelayan
 - a. Dengan bapak siapa ?
 - b. Pekerjaan saat ini sebagai apa?
 - c. Apakah ada pekerjaan lain selain menjadi nelayan?
 - d. Kendala apa yang sering dialami selama melaut?
 - e. Berapa rata-rata pendapatan yang diperoleh dalam satu kali melaut?
 - f. Apakah pernah menerima bantuan dari pemerintah daerah untuk nelayan?
 - g. Apakah dengan adanya bantuan tersebut dapat meningkatkan penghasilan yang di dapatkan?

L

A

M

P

I

R

A

N



A. Dokumentasi Penelitian

i. Surat Pengantar Fakultas



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 613/05/A-2-III/V/44/2023
2000

Makassar, 30 Agustus

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : St.Aisyah

Stambuk : 105711106619

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Judul Penelitian : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA CORAWALI KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuanya diucapkan terimakasih.



Dekan Dr. H. Anli Jam'an, S.E., M.Si
NIDN 451 507

Tembusan:

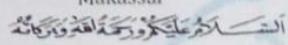
Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. 0411-866972 Fax. 0411-865588 Makassar 90221
Godong Ipa Lantai 7 Kampus Tallokalapang Makassar - Sulawesi Selatan

ii. Surat pengantar Universitas


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 066972 Fax (0411) 065588 Makassar 90221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1449/05/C.4-VIII/V/1444/2023 19 Syawal 1444 H
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 09 May 2023 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 613/05/A.2-II/V/44/2022 tanggal 9 Mei 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **ST. AISYAH**
 No. Stambuk : **10571 1106619**
 Fakultas : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis**
 Jurusan : **Ekonomi Pembangunan**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PERAN PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA CORAWALI KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 12 Mei 2023 s/d 12 Juli 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran



Ketua LP3M,

Dr. H. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

05-23

CS Scanned dengan CamScanner

iii. Surat Pengantar PTSP Provinsi



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 16379/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Barru
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1449/05/C.4-VIII/V/1444/2023 tanggal 09 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: ST.AISYAH
Nomor Pokok	: 105711106619
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PERAN PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA CORAWALI KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **12 Mei s/d 12 Juni 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 12 Mei 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
 Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

iv. Surat Pengantar PTSP Kabupaten

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Maj Pelayanan Publik Mangro 11 1-3 Jl. Iskandar Untu Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
 http://pamonline.barrukab.go.id e-mail: bamsulprptptb@gmail.com Kode Pos 90711

Barro, 16 Mei 2023

Kepada
 Yth. Kepala Desa Corawali Kec. Tanete Rilau Kab.
 Barro
 di- Tempat

Nomor : 231/PP/DPMPPTSP/V/2023
 Lampiran :
 Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Berdasarkan Surat Kepala DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16379/S.01-PTSP/2023 tanggal 12 Mei 2023 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini:

Nama : ST. AISYAH
 Nomor Pokok : 105711106619
 Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
 Pekerjaan : Mahasiswa (SI)
 Alamat : Aluppangge Desa Corawali Kec. Tanete Rilau Kab. Barro

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 16 Mei 2023 s/d 12 JUNI 2023, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul:

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA CORAWALI KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU

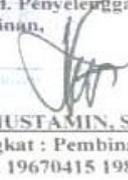
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barro Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barro.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperluhnya

a.n. Kepala Dinas,
Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan,


H. MUSTAMIN, S.Sos, M.M
 Pangkat : Pembina, IV/a
 NIP. 19670415 198810 1003

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Bapak Bupati (sebagai laporan),
2. Kepala Bappelibangda Kab. Barro,
3. Camat Tanete Rilau Kab. Barro,
4. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
5. Mahasiswa yang bersangkutan,
6. Peringgal

v. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU KECAMATAN TANETE RILAU DESA CORAWALI

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

No : 00.9/02/Desa corawali

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : SAID
JABATAN : Kepala Desa Corawali

Menerangkan bahwa :

NAMA : ST. AISYAH
NOMOR POKOK : 1065711106619
PROGRAM STUDI : Ekonomi Pembangunan
PEKERJAAN : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar
ALAMAT : Aluppangge, Dusun aluppangge , Desa Corawali, Kec. Tanete Rilau Kab. Barru
JUDUL SKRIPSI : Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru

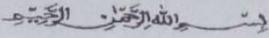
Bahwa tersebut namanya diatas adalah benar telah melaksanakan Penelitian atau Pengambilan Data di wilayah Desa Corawali yang berlangsung mulai pada tanggal 16 Mei 2023 s/d 12 Juli 2023, Dan akan menjadi bahan untuk penyusunan skripsi

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



vi. Surat Keterangan Bebas Plagiasi


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**
 Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588


SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
 Menegaskan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : St. Aisyah
 Nim : 105711106619
 Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	0 %	10 %
2	Bab 2	2 %	25 %
3	Bab 3	0 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
 Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
 seperlunya.

Makassar, 25 Juli 2023
 Mengetahui,
 Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


 Nurhidayah Hafid, M.I.P.
 NB.M. 06 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
 Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
 Website: www.library.unismuh.ac.id
 E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id



ST.AISYAH 105711106619 BAB I

ORIGINALITY REPORT

0 %	0 %	0 %	0 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On

ST.AISYAH 105711106619 BAB II

ORIGINALITY REPORT

2 %	2 %	0 %	0 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id	2 %
	Internet Source	

Exclude quotes On Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

ST.AISYAH 105711106619 BAB III

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

ST.AISYAH 105711106619 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

2 %	2 %	0 %	0 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	2 %
----------	--------------------------------------	------------

Exclude quotes OnExclude matches < 2%Exclude bibliography On

ST.AISYAH 105711106619 BAB V

ORIGINALITY REPORT

0 %	0 %	0 %	0 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On



BIOGRAFI PENULIS

St. Aisyah, lahir di Aluppangge 30 Agustus 2000 dari pasangan suami istri Bapak Abd Salam Bin Dolo (Al-Marhum) dan Ibu Yangkana Cannani. Peneliti adalah anak trakhir dari 6 bersaudara .Peneliti bertempat tinggal di Kabupaten Barru Sulawesi selatan. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri Lalabata tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Tanete Rilau pada tahun 2012. Kemudian pendidikan di SMA Negeri 1 Barru dan selesai pada tahun 2018. Peneliti kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan mengambil program Studi Ekonomi Pembangunan.